



# **Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik**

**VOLUME 11, NO 2, TAHUN 2020**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS GARUT**

## **Chief Editor**

Dini Turipanam Alamanda, S.Tp., M.SM., Faculty Economics, Garut University

## **Associate Editors**

- Rostiena Pasciana, SS.,M.Si., Faculty of Social Science and Political Science, Garut University
- Hasbi Shiddiq Fauzan, S.IP. M.AP., Faculty of Social Science and Political Science, Garut University
- Pupung Pundenswari, S.IP. M.Si., Faculty of Social Science and Political Science, Garut University
- Mila Karmila, S.IP., Faculty of Social Science and Political Science, Garut University
- Riska Nurnafajrin, S.IP., Faculty of Social Science and Political Science, Garut University
- Imas Astri Mustakiah, S.IP., Faculty of Social Science and Political Science, Garut University

## DAFTAR ISI

- **Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Garut**  
Aceng Ulumudin, Nurbudiwati Nurbudiwati, Mila Karmila, Resin Rela Amrilah ..... 1-8  
**PDF**
- **Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Kabupaten Garut No 50 Tahun 2016 Tentang Tupoksi Dinas Sosial Dalam Pembinaan Sosial (Pembinaan Anak Jalanan) di Kabupaten Garut**  
Riksa Raesalat, Farida Aliyati ..... 9-14  
**PDF**
- **Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Garut**  
Ieke Sartika Iriany, Iis Zilfah Adnan, Yowan Rachmawati ..... 15-20  
**PDF**
- **Efektivitas Pelayanan Publik Online Situs Web [www.garutkab.go.id](http://www.garutkab.go.id)**  
Yusuf Hermawan, Ade Purnawan, Riska Nurnafajrin, Nita Rika Lestari ..... 21-30  
**PDF**
- **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pencapaian Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kabupaten Garut**  
Ema Rismayanti, Tistis Nurzayyina Ulfa, Mila Karmila..... 31-40  
**PDF**



## EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA DI KABUPATEN GARUT

Aceng Ulumudin<sup>1</sup>; Nurbudiwati<sup>2</sup>; Mila Karmila<sup>3</sup>; Resin Reli Amrilah<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Administrasi Negara, FISIP Universitas Garut  
[aceng.u@fisip.uniga.ac.id](mailto:aceng.u@fisip.uniga.ac.id)

<sup>2</sup> Administrasi Negara, FISIP Universitas Garut  
[nurbudiwati6@gmail.com](mailto:nurbudiwati6@gmail.com)

<sup>2</sup> Administrasi Negara, FISIP Universitas Garut  
[milakarmila14@fisip.uniga.ac.id](mailto:milakarmila14@fisip.uniga.ac.id)

<sup>4</sup> Administrasi Negara, FISIP Universitas Garut  
[resinra@gmail.com](mailto:resinra@gmail.com)

### Abstrak

Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Garut sebagai fasilitas pemerintah dalam mengentas permasalahan rumah tidak layak huni dirasa belum efektif. Tujuan penelitian ini adalah menilai sejauhmana program dapat mengatasi masalah rumah tidak layak huni di Kabupaten Garut. Metode yang digunakan yaitu menggunakan metode kualitatif dengan data deskriptif. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan triangulasi, dengan empat orang informan penelitian yaitu Kasi Bidang Perumahan Swadaya, Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kadungora, Sekretaris Desa Karangmulya, dan satu orang penerima bantuan. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan pelaksanaan program bantuan sudah dilaksanakan cukup baik namun masih belum optimal. Seperti dalam proses sosialisasi tentang program yang terbatas pada masyarakat, keterbatasan dana dari program, ketidaksiapan data rumah tidak layak huni, minimnya nilai swadaya baik dari kepemilikan penerima bantuan maupun dari karakteristik lingkungan terhadap nilai gotong royong atau partisipasi masyarakat, kurangnya peranan pemerintah setempat, dan kendala adanya prosedur tentang pemilihan toko serta harga satuan bahan bangunan.

**Kata Kunci:** Evaluasi, Pelaksanaan, Program, Triangulasi

### 1. Pendahuluan

Pembangunan merupakan perubahan yang terencana dari suatu situasi ke situasi lain yang lebih baik (Tjahja., 2000). Konsep pembangunan mempunyai kaitan erat dengan nilai, strategi, dan indikator yang sekaligus menjadi domain setiap negara berkembang (Inggriani, 2015). Dengan demikian untuk mendukung pembangunan negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, pemerintah sebagai administrator publik yang bertugas memecahkan masalah yang ada di masyarakat dengan melalui pembuatan, penetapan/pengesahan dan pelaksanaan (implementasi) kebijakan dan/ program serta melakukan evaluasi untuk melihat sejauhmana suatu kebijakan dan/

program dikatakan berhasil dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pembangunan merupakan salah satu wujud nyata pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat (Sudjana, 2006).

Adapun kebijakan/program pemerintah dalam memfasilitasi kebutuhan dasar masyarakat Indonesia salah satunya diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 7 / PRT / M / 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang merupakan program pemberdayaan masyarakat, berfokus pada peningkatan keswadayaan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan rumah secara mandiri. Dari hal tersebut tersirat makna bahwa bantuan stimulan merupakan salah satu cara untuk mewujudkan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan daya beli melalui keswadayaan masyarakat. Sehingga pemenuhan kebutuhan hendak rumah yang layak oleh warga berpenghasilan rendah sangat dipengaruhi oleh keadaan perekonomian, tidak hanya itu pembangunan rumah layak huni memerlukan bayaran besar sehingga susah dijangkau oleh warga miskin (Hawiyah, 2016). Selain itu faktor keterjangkauan daya beli masyarakat, dalam hal ini pemerintah seharusnya mampu ikut memecahkan masalah keterjangkauan daya beli masyarakat untuk memiliki rumah yang layak huni (Murbyanto, 1996).

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang sebagian terdapat bangunan gedung dan rumah yang masih tidak memenuhi persyaratan rumah tidak layak huni, jumlahnya mencapai 284.784 unit rumah pada tahun 2015, sekarang menjadi 189.000 unit rumah. Jumlah rumah tidak layak huni ini kebanyakan berada di Priangan Timur, salah satunya Kabupaten Garut yang terdata pada tahun 2013 ada 56.000 unit rumah tersebar disetiap kecamatan. Sampai saat ini Kabupaten Garut tercatat masih terdapat 46.944 unit rumah tidak layak huni berikut disajikan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 1**  
**Pencapaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**  
**Tahun 2014-2018**

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					Target
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Jumlah rumah tidak layak huni	unit	52,823	52,014	51,174	49,182	46,944	44,000

Sumber: data olahan Bappeda Kabupaten Garut, 2019

Tabel di atas merupakan ketercapaian Pemerintah Kabupaten Garut dalam mengatasi permasalahan rumah tidak layak huni yang ada di Kabupaten Garut, yang menunjukkan jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani setiap tahunnya mengalami penurunan. Pemerintah Kabupaten Garut berusaha untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni selama 5 tahun yaitu 10.000 unit rumah, dengan target setiap tahunnya harus berkurang sebanyak 2.000 unit bahkan lebih. Pada kenyataannya pemerintah hanya mampu merealisasikan bantuan tidak lebih dari 2.000 unit rumah yang terbangun setiap tahunnya.

Perbedaan jumlah capaian rumah layak huni tersebut menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Perumahan dan Permukiman telah berusaha mengatasi rumah tidak layak huni yang ada di Kabupaten Garut ini salah satunya melalui Program BSPS yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, namun dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari permasalahan sehingga bisa dikatakan belum optimal, masalah tersebut yaitu masih terdapatnya rumah tidak layak huni yang belum tersentuh bantuan sedangkan berada di lokasi yang sama mendapat bantuan, bahkan jauh lebih layak untuk memperolehnya. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang program. Dalam teknisnya banyak penerima bantuan membangun rumahnya tidak dilakukan dengan gotong royong bersama masyarakat lain bahkan

bantuan kerja dari ketua RT/RW. Permasalahan dalam keterlambatan pencairan dana juga menghambat pelaksanaannya. Masih belum adanya peningkatan dalam persediaan sarana dan prasarana serta kondisi rumah, hal ini disebabkan tidak semua lokasi mendapatkan perbaikan yang sama. Sehingga dapat dikatakan masih terdapatnya kesenjangan dalam pelaksanaan Program BSPS.

## 2. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan data deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci (Ramdhani and Ramdhani 2016; Sugiyono 2017). Penelitian ini juga menggunakan penelitian eksploratif dan keterliban penelitian ini peneliti menganalisis secara individu, data yang diperoleh merupakan fakta yang diperoleh dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut, fasilitator program, tim teknis dan permukiman yang ada di Kabupaten Garut.

### a. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri sebagai pencari informasi yang memegang peranan yang aktual sehingga nantinya mengungkap realitas yang akan diteliti. Sedangkan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut, Fasilitator program, Tim Teknis program, dan masyarakat (Penerima Bantuan) sebagai sumber informasinya.

### b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan dilakukan berdasarkan kebutuhan data kualitatif yaitu sebagai berikut:

- a. Observasi, observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu melalui pengamatan langsung kelapangan tepatnya di wilayah penerima bantuan di Kabupaten Garut. Sehingga pengamatan langsung ini mendapatkan informasi sesuai penelitian.
- b. Wawancara, teknik ini dilakukan tanya jawab langsung terutama dengan pihak yang melaksanakan program BSPS (Rumah Tidak Layak Huni) ini yaitu Kasi Perumahan Swadaya di Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut sebagai pelaksana daerah, Pemerintah Kecamatan sebagai fasilitator, Pemerintah Desa sebagai bagian dari tim teknis pelaksanaan program. Teknik wawancara ini pula dibantu dengan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya, catatan kecil dan alat perekam.
- c. Dokumentasi, peneliti mencari data melalui dokumen-dokumen penting, seperti laporan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 dan Tahun 2019-2024, Buku Kerja Pendamping BSPS 2019, kebijakan berupa Undang-Undang maupun Peraturan Menteri/Daerah dan sebagainya, dengan cara menganalisis dan mengkaji data-data tersebut.

### c. Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data yang digunakan peneliti adalah uji kredibilitas yang terdiri dari a) Perpanjangan Pengamatan, b) Meningkatkan Ketekunan, c) Menggunakan Bahan Referensi, d) Triangulasi.

## 3. Hasil dan Implikasi

Evaluasi baru dapat di lakukan jika suatu kebijakan tersebut telah berjalan dan diterapkan. Dalam hal ini tidak ada waktu yang pasti mengenai suatu kebijakan harus di evaluasi (Isabella et al., 2017). Untuk mengetahui gambaran tentang evaluasi pelaksanaan Program BSPS di Kabupaten Garut. Peneliti melakukan evaluasi menggunakan teori penilaian umum (Nurcholis, 2007) yaitu *input*, *Proses*, *output*, dan *outcome* (Hamdani & Ramdhani, 2019). Hasil penelitian terhadap ke empat aspek tersebut secara rinci diuraikan sebagai berikut:

**a. Input**

Maksud dari Input disini adalah sumber daya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan Program BSPS agar berjalan dengan baik, maka indikator penilaian sebagai berikut.

- a) Sumber daya pendukung dalam pelaksanaan Program BSPS adalah dana dari program, keswadayaan penerima bantuan, dan pemahaman tentang program itu sendiri. Dalam pelaksanaan Program BSPS di Kabupaten Garut sumber daya pendukung masih kurang memadai. Seperti terbatasnya dana bantuan yang diberikan sehingga penyebaran bantuan belum merata, minimnya keswadayaan penerima bantuan, dan kurangnya pemahaman penerima bantuan yang mengakibatkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan konstruksi rumah.
- b) Bahan-bahan pendukung dalam pelaksanaan Program BSPS yaitu bahan bangunan untuk mendukung pembangunan rumah yang layak huni. Dalam mendapatkan bahan bangunan ada persyaratan yang harus diperhatikan dimana harga satuan bahan harus sesuai dengan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan pemilihan toko harus yang memiliki surat-surat izin yang lengkap. Namun dalam pelaksanaan Program BSPS di Kabupaten Garut tidak semua toko penyedia bahan bangunan memiliki surat-surat izin yang lengkap apalagi bagi daerah-daerah terpencil. Sehingga menjadi kendala dalam mendapatkan bahan pendukung tersebut.

**b. Proses**

Dalam evaluasi yang dilakukan terhadap program BSPS di kabupaten Garut dilihat dari pelaksanaannya apakah sesuai dengan prosedur atau tidak, maka indikator penilaian:

- a) Pelaksanaan Program BSPS tepat sasaran atau tidak.  
Sebagaimana yang tercantum di dalam peraturan Program BSPS ini diperuntukan bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah dan memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan yang telah ditentukan untuk memperoleh bantuan dalam meningkatkan kualitas rumahnya. Pelaksanaan Program BSPS di Kabupaten Garut bisa dikatakan telah tepat sasaran namun karena keterbatasan dana sehingga penyebaran bantuan tidak merata.
- b) Pelaksanaan Program BSPS tepat guna atau tidak.  
Untuk melihat tepat guna atau tidak, dilihat dari bagaimana masyarakat yang melaksanakan program itu. Pelaksanaan Program BSPS di Kabupaten Garut belum bisa dikatakan tepat guna, karena masih ditemukan adanya rumah penerima bantuan yang tidak mengikuti prosedur bentuk rumah sehingga hasilnya kurang memuaskan.
- c) Pelaksanaan Program BSPS efisien atau tidak.  
Pada pelaksanaannya di Kabupaten Garut Program BSPS masih belum dikatakan efisien karena besarnya nilai bantuan yang diberikan tidak akan memenuhi rumah yang layak huni serta minimnya nilai swadaya yang dimiliki masyarakat penerima bantuan.

**c. Output**

Output yaitu perolehan atau hasil dari pelaksanaan kebijakan. Hasil-hasil yang akan diperoleh dari pelaksanaan Program BSPS ini telah ada yang dimana dilakukan oleh pemerintah daerah baik dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut maupun dari setiap Pemerintah Desanya. Untuk melihat hasilnya maka dikembangkan melalui beberapa hal berikut.

- a) Tepat tidaknya sasaran pelaksanaan Program BSPS yang dituju melihat dari proses pelaksanaan Program BSPS di Kabupaten Garut telah tepat sasaran namun dengan jumlah rumah tidak layak huni yang banyak dan keterbatasan dana menjadikan banyak masyarakat yang mengeluh ingin mendapatkan bantuan dari Program BSPS ini.



- b) Berapa besar sasaran pelaksanaan Program BSPS yang telah ter-cover. Hasil dari penelitian pelaksanaan Program BSPS di Kabupaten Garut ini diperoleh bahwa besar sasaran yang telah ditangani belum maksimal karena masih terdapat kendala yang dirasakan dan harus dihadapi sehingga pelaksanaan belum berjalan lancar.

**d. Outcome**

Outcome yaitu adakah dampak/hasil yang nyata dari pelaksanaan kebijakan yang dilakukan terhadap kelompok sasaran yang ada dalam tujuan kebijakan. Untuk melihat dampak dari pelaksanaan Program BSPS dikembangkan dalam beberapa hal berikut.

- a) Ada atau tidaknya perubahan pada sasaran pelaksanaan Program BSPS. Pelaksanaan Program BSPS di Kabupaten Garut telah terjadi perubahan yaitu rumah yang nyaman dan aman yang dirasakan oleh kelompok sasaran walaupun masih belum maksimal.
- b) Seberapa besar perubahan pada kelompok sasaran pelaksanaan Program BSPS. Perubahan yang terjadi variatif, karena nilai swadaya yang dimiliki oleh setiap penerima bantuan berbeda-beda. Semakin besar nilai swadaya yang dimiliki oleh penerima bantuan, maka kualitas rumah akan semakin baik. Sedangkan dengan penerima bantuan yang nilai swadaya yang kecil atau bahkan tidak punya sama sekali, maka perubahannya pun tidak akan cukup besar. Oleh karena itu, karena minimnya nilai swadaya pada calon penerima bantuan di kabupaten Garut mengakibatkan perubahan yang terjadi belum cukup besar.
- c) Seberapa banyak kelompok sasaran Program BSPS yang telah tertangani. Dengan adanya pelaksanaan BSPS di Kabupaten Garut jumlah rumah tidak layak huni berkurang walaupun belum cukup banyak, karena masih sebanyak 46.944 unit rumah tidak layak huni yang belum tersentuh bantuan ini, bahkan telah memenuhi syarat.
- d) Seberapa banyak kelompok sasaran yang terlibat dalam pelaksanaan Program BSPS. Pelaksanaan Program BSPS di Kabupaten Garut masih belum efektif, belum banyak kelompok sasaran yang terlibat karena pembagian bantuan belum menyeluruh ke setiap kecamatan bahkan desa. Dimana selama tahun 2015 sampai tahun 2019 baru 10.000 unit rumah yang terbangun dari jumlah rumah tidak layak huni 56.000 unit, sehingga masih ada 46.944 unit rumah tidak layak huni.

Dalam pelaksanaan Program BSPS tidak terlepas dari beberapa masalah yang menghambat pada berjalannya pelaksanaan program di Kabupaten Garut seperti masalah yang dituturkan oleh Kasi bidang Perumahan Swadaya Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut tentang hambatan dalam pelaksanaan program, yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang program menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial, keluhan pemerintah desa, dan dari toko penyedia bahan bangunan.

Selain itu ada pula faktor penghambat dalam pelaksanaan Program BSPS yang disampaikan oleh Ketua bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kadungora di mana ketidaksiapan data rumah tidak layak huni dari setiap pemerintah desa saat pelaksanaan pengajuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah, kurangnya partisipasi masyarakat, kurang efektifnya proses sosialisasi karena sosialisasi dibatasi hanya kepada penerima bantuan sehingga menimbulkan kecemburuan terhadap masyarakat lain, perbedaan karakteristik setiap daerah, kurangnya keterlibatan pemerintah setempat dalam program karena yang mendampingi dilakukan oleh tenaga fasilitator khusus, dan minimnya nilai swadaya yang dimiliki penerima bantuan. Faktor penghambat lain juga disampaikan oleh Sekretaris Desa yaitu adanya keterlambatan bahan karena adanya prosedur pemilihan toko serta harga satuan bahan bangunan.



Berdasarkan beberapa faktor penghambat diatas dapat kita pahami, bahwa sebenarnya untuk pelaksanaan suatu kebijakan termasuk pelaksanaan Program BSPS ini memerlukan banyak dukungan baik dari berbagai pihak. Sehingga pelaksanaan Program BSPS ini mampu berjalan sesuai dengan tujuan.

#### **4. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Sumber daya pendukung yang kurang memadai dalam segi nilai swadaya dan pemahaman tentang program oleh kelompok sasaran, serta bahan material pembangunan rumah yang tidak mudah didapatkan.
- b) Pada aspek proses: belum optimal dalam sosialisasi terhadap masyarakat sehingga masyarakat kurang mengetahui akan program itu sendiri dan kurangnya komunikasi secara interkasi di dalamnya. Sehingga untuk pendekatan proses ini belum dikatakan efektif. Dimana pembagian bantuan masih belum merata ke setiap daerah, kurangnya pemahaman penerima bantuan tentang program yang menyebabkan pelaksanaan pembangunan rumah masih terdapat yang belum meningkat kualitasnya setelah mendapatkan bantuan serta kurangnya peranan pengurus setempat dalam pelaksanaan program ini.
- c) Pada aspek output: jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Garut berkurang dengan adanya Program BSPS namun karena proses pelaksanaan yang belum optimal sehingga masih banyaknya rumah tidak layak huni.
- d) Pada aspek outcome: Program BSPS sudah dilaksanakan di Kabupaten Garut dan perubahannya sudah dirasakan oleh beberapa penerima manfaat program meskipun belum maksimal.

#### **5. Rekomendasi**

Adapun rekomendasi dari penelitian ini yaitu untuk aspek input: lebih ditingkatkan lagi dana untuk Program BSPS kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Sedangkan untuk aspek proses: alangkah baiknya sosialisasi dilakukan dengan lebih intensif kepada penerima bantuan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut. Pemerintah Desa di Kabupaten Garut untuk lebih aktif lagi mencari menggali potensi dan masalah yang ada. Masyarakat yang menerima bantuan perhatikan dengan seksama pada saat berjalannya sosialisasi teknis pelaksanaan pembangunan rumah agar proses pembangunan sesuai dengan prosedur dan tidak terjadi kesalahpahaman.

#### **Ucapan Terimakasih**

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua pihak yang telah membantu dalam penelitian ini.

## Daftar Pustaka

- Ahmad Sururi, & Pasciana, R. (2020). Dynamic Governance and The Strengthening Community Participation in Countermeasure Coronavirus Disease. *IAPA Proceedings Conference*, 254–264.
- Akbar, G. G., Hermawan, Y., & Karlina, A. L. (2019). Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 10(2), 1–8. <https://doi.org/10.36624/jpkp.v10i2.40>
- Hamdani, N. A., & Ramdhani, A. (2019). *Teori Organisasi*. Karima.
- Hawiyah, S. (2016). *Evaluasi Kebijakan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Masyarakat Kelurahan Sijantung Kecamatan Galang Kota Batam Tahun 2014*. Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang.
- Inggriani. (2015). *Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya*. Jurusan Ilmu Administrasi – Prodi Administrasi Publik.
- Isabella, Sesar, J., & Amaliatulwalidain. (2017). Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ( Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Tahun 2014). *JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK*, 2(1).
- Kuriawan, W. A., Alamanda, D. T., Ramdhani, A., & Akbar, G. G. (2019). *Modul Praktika Komputer II*. Universitas Garut.
- Murbyanto. (1996). *Strategi Pembangunan Ekonomi Dalam Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Aditya Media.
- Nurcholis, H. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ramdhani, A., Kuriawan, W. A., Alamanda, D. T., & Akbar, G. G. (2018). *Modul Praktika Komputer I*. Universitas Garut.
- Ramdhani, M. A., & Ramdhani, A. (2016). *Penelitian Pemasaran* (1st ed.). Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung.
- Sudjana. (2006). *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tjahja. (2000). *Konsep Pembangunan Yang Melakukan Pendekatan Kemanusiaan*. Gadjah Mada Press.

